Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

EFEKTIVITAS SISTEM ALL INDONESIA DALAM MENDUKUNG PELAYANAN KEIMIGRASIAN: EVALUASI AWAL BERBASIS DATA SEKUNDER DAN PENGALAMAN PENGGUNA

Dinna Miranda Pakpahan[1], Imma Yedida Ardi[2], Mas Budi Priyatno[3]
[1,2,3]Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1]dinnamirandaaa@gmail.com

ABSTRACT

Digital transformation in international border services requires integrated immigration, customs, health, and quarantine processes. Since 1 October 2025, the Indonesian Government has implemented All Indonesia as an integrated international arrival declaration system. This study evaluates the early effectiveness of All Indonesia in supporting immigration services using a qualitative descriptive-evaluative approach based on documentary research and secondary-data content analysis. Sources include government administrative data, findings from the Ombudsman of the Republic of Indonesia, international mobility statistics, platform data, user reviews, regulations, and academic studies published in 2021-2026. The analysis applies the six dimensions of the DeLone and McLean Information Systems Success Model: system quality, information quality, service quality, use, user satisfaction, and net benefits. By 10 December 2025, 7,935,010 declarations had been recorded, while consolidated data for 1 October-9 December 2025 showed an 87.28% completion rate. High use, however, does not necessarily indicate satisfaction because the system is mandatory. In early October 2026, Google Play displayed more than one million downloads with a rating of approximately 2.5/5, while the Indonesian App Store displayed a 2.0/5 rating. Exploratory analysis of 13 unique, verifiable reviews identified recurring issues involving reliability, verification, passport scanning, data persistence, and family-member scenarios. The findings indicate that All Indonesia demonstrates early effectiveness in integration, declaration simplification, and operational adoption, while system quality, service quality, user satisfaction, and net benefits still require stronger outcome measurement. Sustained effectiveness requires improved reliability, end-to-end interoperability, data governance, and representative user-satisfaction evaluation.

***Keywords**: All Indonesia; effectiveness; immigration services; DeLone and McLean; digital transformation; user experience*

ABSTRAK

Transformasi digital layanan perlintasan internasional menuntut integrasi proses keimigrasian, kepabeanan, kesehatan, dan karantina. Sejak 1 Oktober 2025, Pemerintah Indonesia memberlakukan All Indonesia sebagai sistem deklarasi kedatangan internasional terpadu. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas awal All Indonesia dalam mendukung pelayanan keimigrasian melalui pendekatan deskriptif-evaluatif kualitatif berbasis documentary research dan analisis isi data sekunder. Sumber penelitian mencakup data administratif pemerintah, temuan Ombudsman Republik Indonesia, statistik mobilitas internasional, data platform, ulasan pengguna, regulasi, dan artikel ilmiah periode 2021-2026. Analisis mengacu

pada enam dimensi DeLone dan McLean: system quality, information quality, service quality, use, user satisfaction, dan net benefits. Hingga 10 Desember 2025 tercatat 7.935.010 pengisian, sedangkan konsolidasi 1 Oktober-9 Desember 2025 menunjukkan tingkat pengisian 87,28%. Namun, penggunaan yang tinggi tidak serta-merta menunjukkan kepuasan karena sistem bersifat wajib. Pada awal Oktober 2026, Google Play menampilkan lebih dari satu juta unduhan dengan rating sekitar 2,5/5, sedangkan App Store Indonesia menampilkan rating 2,0/5. Analisis eksploratif terhadap 13 ulasan unik yang dapat diverifikasi menunjukkan masalah dominan pada reliabilitas, verifikasi, pemindaian paspor, persistensi data, dan skenario anggota keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa All Indonesia efektif secara awal pada integrasi, simplifikasi deklarasi, dan adopsi operasional, tetapi kualitas sistem, kualitas layanan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih masih memerlukan pengukuran outcome yang lebih kuat. Keberlanjutan efektivitas memerlukan peningkatan reliabilitas, interoperabilitas end-to-end, tata kelola data, serta evaluasi kepuasan yang representatif.

Kata kunci: All Indonesia; efektivitas; pelayanan keimigrasian; DeLone dan McLean; transformasi digital; pengalaman pengguna

A. Pendahuluan

Transformasi digital pelayanan publik menuntut integrasi proses, data, organisasi, dan pengalaman pengguna, bukan sekadar memindahkan formulir ke media elektronik. Dalam pelayanan keimigrasian, kebutuhan ini semakin kompleks karena pemeriksaan perbatasan beririsan dengan keamanan, kepabeanan, kesehatan, karantina, dan fasilitasi perjalanan. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 menjadi landasan integrasi layanan digital pemerintah, sedangkan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 membentuk konteks kelembagaan baru bagi modernisasi pelayanan dan pengawasan perlintasan.

All Indonesia hadir sebagai sistem deklarasi kedatangan internasional yang mengintegrasikan informasi keimigrasian, kepabeanan, kesehatan, dan karantina dalam satu kanal digital. Setelah uji coba pada Juli 2025, sistem diberlakukan secara nasional mulai 1 Oktober 2025 pada bandara dan pelabuhan internasional. Deklarasi dapat dilakukan melalui web atau aplikasi sejak tiga hari sebelum kedatangan untuk mengurangi pengisian berulang dan memperkuat pertukaran data antarlembaga (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, 2025; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

Skala layanan yang dihadapi cukup besar. BPS (2026) mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2025, sedangkan penumpang udara internasional Januari-Juli 2025 mencapai 11,6 juta orang (BPS, 2025a). Angka tersebut tidak digunakan sebagai denominator pengguna All Indonesia karena unit statistiknya berbeda, tetapi menunjukkan besarnya mobilitas internasional yang harus ditangani sistem.

Implementasi awal menunjukkan adopsi operasional yang cepat. Hingga 10 Desember 2025 tercatat 7.935.010 pengisian, terdiri atas 3.449.281 oleh WNI dan 4.485.729 oleh WNA. Data 1 Oktober-9 Desember 2025 menunjukkan tingkat pengisian 87,28%, dengan 69,05% dilakukan sebelum kedatangan, sementara integrasi electronic Customs Declaration mencapai 98,67% (Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, 2026). Angka 7.935.010 diperlakukan sebagai jumlah pengisian, bukan pengguna unik.

Tingginya penggunaan tidak dapat langsung disamakan dengan keberhasilan sistem. DeLone dan McLean (2003) menilai keberhasilan sistem informasi melalui system quality, information quality, service quality, use, user satisfaction, dan net benefits. Pada sistem wajib seperti All Indonesia, penggunaan tinggi lebih mencerminkan kepatuhan operasional sehingga harus dibaca bersama kualitas sistem dan kepuasan pengguna. Temuan Varastika et al. (2025) pada M-Paspor juga menegaskan pentingnya kualitas sistem, informasi, layanan, kepuasan, dan kepercayaan.

Pengalaman pengguna memberikan sinyal yang berbeda dari data adopsi. Pada awal Oktober 2026, Google Play menampilkan lebih dari satu juta unduhan dengan rating sekitar 2,5/5, sedangkan App Store Indonesia menampilkan rating 2,0/5. Ulasan publik menunjukkan keluhan mengenai crash, verifikasi gagal, pemindaian paspor yang tidak akurat, data yang hilang, serta penambahan anggota keluarga, meskipun terdapat pula pengalaman positif (Google Play, 2026; Apple App Store, 2026). Rating dan ulasan tidak mewakili seluruh pengguna, tetapi relevan sebagai sinyal kualitas pengalaman.

Pengawasan eksternal menunjukkan bahwa integrasi digital belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan layanan. Ombudsman Republik Indonesia (2025) menyoroti dasar hukum, penerapan mandatory yang belum merata, belum penuhnya integrasi dengan Visa on Arrival dan Bebas Visa Kunjungan, serta risiko maladministrasi ketika bantuan manual masih diperlukan. Peninjauan Januari 2026 mencatat kemajuan, tetapi masih menemukan kebingungan alur, kebutuhan koordinasi lintas instansi, mekanisme pengaduan, dan perlunya payung hukum yang lebih kuat (Ombudsman Republik Indonesia, 2026).

Pada 2026, fungsi All Indonesia berkembang melampaui arrival declaration. Keputusan Bersama Nomor 1 Tahun 2026 mengintegrasikan OSS, pelayanan ketenagakerjaan, dan All Indonesia untuk layanan tenaga kerja asing terkait penanaman modal. Perluasan ini memperkuat potensi All Indonesia sebagai ekosistem layanan digital terpadu sekaligus meningkatkan tuntutan interoperabilitas, tata kelola data, dan reliabilitas sistem.

State of the art pada 2026 menunjukkan fokus yang masih terfragmentasi. Gempita dan Riyanta (2026) membahas All Indonesia sebagai early warning system dan menyoroti koordinasi serta integrasi data. Kajian layanan keimigrasian digital lainnya banyak berfokus pada M-Paspor, kualitas layanan, atau penerimaan teknologi (Bahri et al., 2025; Varastika et al., 2025). Karena itu, masih terbatas penelitian yang menggabungkan data administratif, temuan pengawas, statistik mobilitas, dan suara pengguna untuk menilai efektivitas All Indonesia melalui kerangka keberhasilan sistem informasi.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas awal All Indonesia dalam mendukung pelayanan keimigrasian, menilai enam dimensi DeLone dan McLean, menganalisis pengalaman pengguna secara eksploratif, dan merumuskan area perbaikan melalui triangulasi data. Kebaruannya terletak pada penggabungan tiga perspektif bukti: penyelenggara melalui data administratif, pengawasan melalui temuan Ombudsman, dan pengguna melalui rating serta ulasan platform. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi kesenjangan antara tingginya

adopsi operasional dan kualitas pengalaman pengguna.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan desain deskriptif-evaluatif kualitatif berbasis documentary research dan analisis isi data sekunder. Desain ini dipilih karena All Indonesia masih relatif baru dan belum tersedia dataset publik yang memungkinkan pengujian kausal sebelum-sesudah secara nasional. Oleh karena itu, penelitian mengevaluasi indikasi efektivitas awal berdasarkan konvergensi dan perbedaan bukti dari berbagai sumber tanpa mengklaim dampak kausal.

Strategi Penelusuran dan Seleksi Sumber

Penelusuran dilakukan sampai 3 Oktober 2026 melalui Google Scholar, Crossref/laman penerbit, GARUDA atau laman jurnal institusi, serta repositori akademik bila diperlukan. Kata kunci mencakup All Indonesia, layanan keimigrasian digital, M-Paspor, e-government immigration, DeLone McLean immigration, user satisfaction immigration application, dan integrated arrival declaration. Literatur empiris diprioritaskan pada periode 2021-2026, sedangkan DeLone dan McLean (2003) digunakan sebagai sumber teori asli.

Sumber dimasukkan apabila relevan dengan All Indonesia, layanan keimigrasian digital, integrasi layanan publik digital, atau model keberhasilan sistem informasi; identitasnya dapat diverifikasi; dan tersedia informasi yang cukup untuk menilai metode atau temuan. Data implementasi harus berasal dari lembaga resmi atau platform aplikasi. Sumber utama meliputi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Kesehatan, BPS, Ombudsman RI, JDIH Kementerian Ketenagakerjaan, Google Play, dan Apple App Store.

Analisis Ulasan Pengguna

Analisis ulasan bersifat eksploratif dan bukan survei representatif. Ulasan dikumpulkan pada 3 Oktober 2026 dari Google Play dan bagian Ratings & Reviews Apple App Store Indonesia. Setelah duplikasi dihapus, diperoleh 13 ulasan unik yang memiliki isi substantif. Ulasan dikodekan secara manual ke tema reliabilitas/stabilitas, input-verifikasi-pemindaian, persistensi

data, anggota keluarga/skenario pengguna, kemudahan penggunaan, dan manfaat layanan. Frekuensi tema tidak digeneralisasi sebagai proporsi seluruh pengguna dan hanya dipakai sebagai sinyal kualitatif yang ditriangulasikan dengan rating agregat, riwayat pembaruan, data implementasi, serta temuan Ombudsman.

Teknik Analisis

Bukti dikategorikan ke dalam enam dimensi DeLone dan McLean, kemudian dianalisis dengan pattern matching untuk melihat konsistensi atau perbedaan antara sumber pemerintah, pengawas eksternal, dan pengguna. Penilaian efektif secara awal hanya diberikan apabila bukti operasional relatif konsisten. Ketika data outcome seperti waktu layanan, antrean, error rate nasional, atau survei kepuasan representatif belum tersedia, penelitian menyatakan keterbatasan tersebut dan menghindari klaim kausal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi dan Skala Penggunaan

Pemberlakuan nasional sejak 1 Oktober 2025 menggeser deklarasi yang terfragmentasi menuju satu kanal digital. Hingga 10 Desember 2025 tercatat 7.935.010 pengisian; tingkat pengisian konsolidasi mencapai 87,28% dan 69,05% dilakukan dari negara asal. Angka ini menunjukkan penetrasi operasional yang tinggi dan terbentuknya pre-arrival data dalam waktu singkat.

Namun, dimensi use tidak dapat diperlakukan sebagai bukti kepuasan karena All Indonesia bersifat wajib. Dengan demikian, tingkat pengisian yang tinggi lebih tepat dibaca sebagai indikator jangkauan implementasi daripada bukti tunggal keberhasilan sistem (DeLone & McLean, 2003).

System Quality: Integrasi Fungsional Berjalan, Reliabilitas Mobile Masih Menjadi Titik Lemah

Dari sisi arsitektur layanan, All Indonesia menyediakan kanal web dan aplikasi serta menggabungkan deklarasi empat fungsi lintas instansi. Pemerintah juga mengembangkan dashboard monitoring, fitur

keamanan, pilihan bahasa, dan integrasi kesehatan. Riwayat pembaruan App Store dan Google Play menunjukkan perbaikan bug, terjemahan, pertanyaan kesehatan, dan stabilitas secara berkala sehingga terdapat proses continuous improvement.

Di sisi lain, pengalaman mobile masih menunjukkan gap. Pada awal Oktober 2026, Google Play menampilkan rating sekitar 2,5/5 dari sekitar 1,32 ribu ulasan dengan lebih dari satu juta unduhan, sedangkan App Store Indonesia menampilkan rating 2,0/5 dari 206 rating. Rating tersebut dipengaruhi self-selection bias dan perbedaan storefront, tetapi tetap menjadi sinyal penting dalam evaluasi system quality.

Analisis Isi Ulasan Pengguna

Tabel 1 Analisis Isi Ulasan Pengguna

Tema	Indikasi dari ulasan yang dapat diverifikasi	Interpretasi DeLone-McLean
Reliabilitas/stabilitas	Ulasan berulang menyebut crash, aplikasi menutup sendiri, gagal melanjutkan langkah, atau tidak mencapai QR code.	Mengindikasikan masalah reliability dan response pada system quality.
Verifikasi & pemindaian	Terdapat keluhan gagal verifikasi, input KITAS/visa bermasalah, OCR paspor salah membaca huruf/angka, scan/dropdown tidak bekerja.	Menunjukkan friksi pada input validation dan accuracy antarmuka.
Persistensi data	Pengguna melaporkan input hilang setelah berpindah layar atau aplikasi menutup.	Berhubungan dengan reliability dan data persistence.
Anggota keluarga/skenario khusus	Keluhan muncul ketika menambahkan anggota keluarga atau skenario pemegang izin tinggal.	Menunjukkan kebutuhan pengujian use-case yang lebih beragam.
Pengalaman positif	Sebagian ulasan menyatakan aplikasi bekerja baik, mudah dinavigasi, dan dapat diisi sebelum perjalanan.	Menunjukkan system quality dapat memadai pada kondisi/perangkat tertentu.
Kesimpulan eksploratif	Dari 13 ulasan unik yang dianalisis, 11 memuat pengalaman negatif/masalah teknis dan 2 memuat pengalaman positif.	Bukan estimasi prevalensi; digunakan sebagai sinyal kualitatif yang mendukung perlunya pengukuran UX representatif.

Pola ulasan sejalan dengan studi keimigrasian digital yang lebih mapan. Varastika et al. (2025) menunjukkan pentingnya kualitas sistem dan kepuasan pada M-Paspor, sedangkan Bahri et al. (2025) menemukan

keterkaitan kualitas layanan digital dengan kepuasan pengguna. Artinya, integrasi backend All Indonesia harus diikuti reliabilitas front-end agar pengguna tidak menanggung transaction cost baru berupa troubleshooting digital.

Information Quality: Penyederhanaan Informasi Berhasil, Konsistensi dan Multibahasa Perlu Dijaga

Prinsip single declaration merupakan kekuatan utama All Indonesia karena informasi yang sebelumnya tersebar ditempatkan dalam satu alur. Pembaruan 2026 juga mencakup perbaikan terjemahan dan pertanyaan kesehatan. Namun, ulasan pengguna dan temuan Ombudsman menunjukkan kebingungan prosedur masih terjadi pada skenario tertentu, sehingga information quality perlu dinilai dari kejelasan instruksi, konsistensi istilah, urutan pertanyaan, multibahasa, dan hasil verifikasi.

Service Quality: Kekuatan Integrasi Lintas Instansi Masih Dibatasi Gap Alur dan Pengaduan

Ombudsman menjadi sumber independen utama untuk dimensi service quality. Kajian November 2025 menilai bantuan pengisian dan administrasi VoA masih dapat menimbulkan kontak langsung serta risiko maladministrasi, sementara integrasi dengan VoA/BVK belum penuh. Peninjauan Januari 2026 mencatat kemajuan tetapi masih menemukan masalah alur, koordinasi lintas instansi, dan mekanisme pengaduan (Ombudsman Republik Indonesia, 2025, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa service quality merupakan atribut ekosistem, bukan aplikasi semata. Ketika pengguna mengalami kegagalan sistem, kualitas layanan bergantung pada fallback process, petugas bantuan, kanal pengaduan, dan koordinasi antarinstansi. Evaluasi lanjutan sebaiknya mengukur response time helpdesk, first-contact resolution, jumlah insiden, waktu pemulihan, dan proporsi pengguna yang membutuhkan bantuan manual.

User Satisfaction: Rating Rendah Menuntut Survei Representatif

Belum ditemukan survei kepuasan nasional yang secara khusus mengukur pengalaman pengguna All Indonesia dengan sampel representatif. Karena itu,

rating Google Play sekitar 2,5/5 dan App Store Indonesia 2,0/5 hanya digunakan sebagai indikator sinyal, bukan indeks kepuasan populasi. Perbedaan storefront juga menunjukkan bahwa rating bersifat dinamis dan dipengaruhi komposisi pengguna.

Kombinasi rating rendah dan keluhan teknis tetap menunjukkan perlunya evaluasi kepuasan yang lebih sistematis. Pemerintah dapat melakukan intercept survey di pintu masuk utama atau survei pasca-kedatangan yang mengukur ease of use, reliability, clarity, perceived time saving, trust, dan overall satisfaction, dengan membedakan kanal, kewarganegaraan, bahasa, usia, pintu masuk, serta skenario perjalanan.

Net Benefits: Manfaat Integrasi Terlihat, Outcome Efisiensi Belum Dapat Dibuktikan Secara Kausal

Data yang tersedia menunjukkan manfaat proses berupa penyederhanaan deklarasi, integrasi lintas instansi, dan tersedianya pre-arrival data. Tingkat pengisian sebelum kedatangan 69,05% berpotensi mendukung pemeriksaan berbasis risiko, sedangkan integrasi e-CD 98,67% menunjukkan migrasi proses kepabeanan ke kanal terpadu.

Namun, belum tersedia data publik nasional yang cukup untuk mengukur perubahan waktu pemeriksaan, antrean, biaya operasional, kebutuhan petugas, atau error rate sebelum dan sesudah implementasi. Karena itu, manfaat yang dapat dinyatakan secara defensibel terbatas pada simplifikasi kanal, ketersediaan pre-arrival data, dan integrasi proses. Pengukuran net benefits berikutnya memerlukan desain before-after atau difference-in-differences apabila data tersedia.

Konteks Mobilitas Internasional dan Signifikansi Skala

Statistik BPS menunjukkan bahwa digitalisasi perlintasan diterapkan pada lingkungan dengan volume tinggi: 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025 dan 11,6 juta penumpang udara internasional pada Januari-Juli 2025. Meskipun tidak dapat dibandingkan langsung dengan jumlah pengisian All Indonesia, skala tersebut menunjukkan bahwa friksi kecil pada aplikasi dapat berdampak pada banyak pengguna sehingga

reliabilitas, kapasitas, multibahasa, dan fallback process menjadi penting.

Tata Kelola, Dasar Hukum, dan Perlindungan Data

All Indonesia memproses data pribadi dan data perjalanan lintas sektor sehingga tata kelolanya perlu konsisten dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan prinsip SPBE. Penelitian ini tidak menemukan audit keamanan atau penetration-test report yang dapat diverifikasi secara publik, sehingga tidak menyimpulkan sistem aman atau tidak aman secara teknis.

Ombudsman pada Januari 2026 menilai perlunya payung hukum yang lebih kuat karena sistem melibatkan banyak kementerian/lembaga. Integrasi OSS, layanan ketenagakerjaan, dan All Indonesia melalui Keputusan Bersama Nomor 1 Tahun 2026 memperluas interoperabilitas, tetapi juga meningkatkan kebutuhan pengaturan kewenangan, data sharing, retensi data, audit trail, incident response, dan mekanisme koreksi data.

Sintesis Efektivitas Berdasarkan DeLone dan McLean

Sintesis menunjukkan bahwa All Indonesia efektif secara awal terutama pada dimensi use dan integrasi proses, tetapi belum tepat disebut sepenuhnya efektif. Dalam sistem wajib, keberhasilan perlu bergerak dari sekadar banyak digunakan menuju layanan yang reliabel, mudah dipahami, terintegrasi, aman, dan menghasilkan outcome yang terukur.

D. Kesimpulan

All Indonesia menunjukkan efektivitas awal yang kuat pada konsolidasi deklarasi dan adopsi operasional. Dalam sekitar dua bulan pertama implementasi nasional tercatat 7.935.010 pengisian dengan tingkat pengisian 87,28%. Integrasi e-CD, pengisian pre-arrival, dan perluasan fungsi pada 2026 menegaskan posisi strategis sistem dalam transformasi layanan keimigrasian dan ekosistem perlintasan digital Indonesia.

Efektivitas tersebut belum optimal pada seluruh dimensi. Rating platform yang rendah dan ulasan eksploratif menunjukkan masalah reliabilitas, verifikasi, pemindaian

paspor, persistensi data, dan skenario anggota keluarga. Temuan Ombudsman juga menunjukkan bahwa kualitas layanan dipengaruhi payung hukum, integrasi VoA/BVK, alur pelayanan, koordinasi lintas instansi, serta mekanisme pengaduan.

Temuan utama penelitian adalah kesenjangan antara keberhasilan adopsi/integrasi dan kualitas pengalaman pengguna. Bukti publik belum cukup untuk menyimpulkan besarnya dampak terhadap waktu pemeriksaan, antrean, biaya, atau kepuasan populasi. Karena itu, kesimpulan yang paling defensibel adalah bahwa All Indonesia efektif secara awal pada integrasi dan jangkauan implementasi, sedangkan system quality, service quality, user satisfaction, dan net benefits masih membutuhkan pengukuran outcome yang lebih ketat.

Saran

Direktorat Jenderal Imigrasi bersama instansi CIQ perlu memprioritaskan reliabilitas dan pengalaman pengguna, khususnya stabilitas aplikasi, validasi dokumen dan pemindaian paspor, autosave, skenario anggota keluarga, serta kompatibilitas perangkat dan jaringan. Perbaikan perlu diikuti publikasi indikator seperti system uptime, crash-free sessions, error rate, waktu penyelesaian deklarasi, bantuan manual, response time pengaduan, dan median waktu proses kedatangan.

Interoperabilitas perlu diarahkan dari integrasi formulir menuju layanan end-to-end yang terhubung secara proporsional dengan VoA/BVK, autogate, biometrik, kesehatan, kepabeanan, karantina, dan layanan terkait. Pengembangan harus disertai tata kelola data yang memperjelas dasar hukum, pembagian peran, hak akses, retensi, audit trail, mekanisme koreksi, incident response, dan pengaduan dengan prinsip one-time data submission sesuai kewenangan.

Evaluasi efektivitas perlu diperkuat melalui survei kepuasan pasca-kedatangan yang representatif dan dibedakan menurut kanal web/mobile, kewarganegaraan, bahasa, usia, pintu masuk, serta skenario perjalanan. Penelitian lanjutan dapat menggunakan data primer atau log sistem melalui desain before-after, analisis crash/error, survei berbasis DeLone-McLean, atau perbandingan antarbandara dan

pelabuhan agar manfaat bersih dapat diukur lebih presisi.

DAFTAR PUSTAKA

Apple App Store. (2026). All Indonesia: Ratings & Reviews. Apple Inc. Diakses 3 Oktober 2026.

Badan Pusat Statistik. (2025a, 1 September). Penumpang angkutan udara internasional pada Juli 2025 naik 10,16 persen menjadi 1,8 juta orang. Berita Resmi Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026). Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2025. BPS-Statistics Indonesia.

Bahri, S., Lumbanraja, P., & Rahmadani, V. G. (2025). Pengaruh kualitas layanan digital (E-Servqual) terhadap kepuasan pengguna aplikasi M-Paspor (Studi kasus Kantor Imigrasi Medan). Jurnal Manajemen Stratejik dan Simulasi Bisnis, 6(2), 35-50. https://doi.org/10.25077/mssb.6.2.35-50.2025

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9-30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748

Gempita, F., & Riyanta, S. (2026). All Indonesia Early Warning System intelijen imigrasi terhadap penumpang internasional bermasalah ke Indonesia. Jurnal Impresi Indonesia, 5(4), 1863-1873. https://doi.org/10.58344/jii.v5i4.7636

Google Play. (2026). All Indonesia - Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenimipas RI. Google Play Store. Diakses 3 Oktober 2026.

Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Indonesia. (2023). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Indonesia. (2024a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Indonesia. (2024b). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2025, 1 Oktober). Mulai 1 Oktober, deklarasi kedatangan penumpang wajib dilakukan di aplikasi All Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, 1 Oktober). All Indonesia perkuat deteksi dini penyakit menular di pintu masuk negara.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2026). Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2026 tentang integrasi OSS, sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan, dan Aplikasi All Indonesia dalam pelayanan tenaga kerja asing dalam rangka penanaman modal.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. (2026). Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Tahun 2025.

Ombudsman Republik Indonesia. (2025, 27 November). Ombudsman RI dorong digitalisasi dan integrasi lintas sektor dalam layanan keimigrasian dan aplikasi All Indonesia bandara internasional. Siaran Pers Nomor 58/HM.01/XI/2025.

Ombudsman Republik Indonesia. (2026, 20 Januari). Ombudsman RI dorong penguatan regulasi All-Indonesia demi layanan keimigrasian terpadu dan berkeadilan.

Varastika, D., Wijaya, M. E., Aurelie, M. S. C., Handayani, P. W., & Fitriani, H. (2025). Mobile passport success in Indonesia based on the DeLone-McLean information systems success model. Telematics and Informatics Reports, 20, 100251. https://doi.org/10.1016/j.teler.2025.100251